



BADAN POM



**LAPORAN KINERJA
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2018**

SAMBUTAN

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2018 yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja dan implementasi *good governance* terhadap publik dan *stakeholders*. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran capaian kinerja secara terperinci yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi dalam mendukung kinerja BPOM selama tahun 2018.

Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi dan misi BPOM, laporan ini menyajikan data terpadu antara kinerja dengan anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, serta produktivitas unit kerja. Biro Hukum dan Organisasi selalu berupaya melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki kinerja dan menyempurnakan pelaporan dalam rangka mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan penyusunan program di tahun berikutnya.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan media pertanggungjawaban kepada stakeholders serta memberi kontribusi dalam evaluasi peningkatan kualitas kinerja Biro Hukum dan Organisasi.

Jakarta, Januari 2019

Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Riati Anggrani, SH., MARS., M.HUM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi 2018 merupakan perwujudan akuntabilitas Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menjadi Biro Hukum dan Organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Laporan ini memuat capaian kinerja selama tahun 2018 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja 2018 baik Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat maupun Biro Hukum dan Organisasi. Rencana Kinerja 2018 pada Organisasi dan Tata Kerja lama mengacu pada Rencana Strategis Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 2015-2019 Nomor HK. 04.23.05.15.0655 Tahun 2015. Untuk mewujudkan visi dan misi BPOM, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagai unit pendukung memiliki 6 (enam) Sasaran Strategis, yaitu: (1) Jumlah Peraturan Kepala BPOM yang diundangkan, dengan capaian 100%; (2) Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan capaian 101,5 %; (3) Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan dengan capaian 80%; (4) Persentase Pengaduan Konsumen yang ditindaklanjuti 130%, (5) Jumlah informasi obat dan makanan yang dipublikasikan 69,84%; (6) Jumlah layanan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti dengan capaian 130%. Dari keenam indikator tersebut di atas, hanya 2 indikator mencapai dengan kriteria memuaskan sedangkan capaian indikator lainnya kurang dan di atas 120% dikarenakan capaian pada indikator tersebut baru diperhitungkan pada akhir tahun, realisasi yang diperhitungkan hanya sampai triwulan II pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Seiring berjalannya waktu BPOM melakukan restrukturisasi dengan diterbitkannya Perka BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM. Terdapat perubahan nomenklatur dari Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menjadi Biro Hukum dan Organisasi. Biro Hukum dan Organisasi melakukan review dokumen berupa revisi renstra Biro Hukum dan Organisasi Nomor HK.04.2.22.09.18.1344 tentang Revisi Rencana Strategis Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2015-2019. Untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM, Biro Hukum dan Organisasi sebagai unit pendukung memiliki 6 Sasaran Strategis, yaitu: (1) Meningkatnya Capaian RB BPOM di Lingkungan Biro Hukum dan Organisasi sesuai roadmap RB 2015-2019; (2) Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi; (3) Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi; (4) Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran; (5) Tersedianya Peraturan Perundangan-undangan dan Advokasi Hukum (6) Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi BPOM sesuai road map RB BPOM 2015-2019.

Keenam Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh 9 (Sembilan) Indikator Sasaran termasuk Indikator Kinerja Utama. Capaian Indikator Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan, dengan capaian 102,1% *)
2. Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi, dengan capaian 108,67*)

3. Nilai RB BPOM Penataan tata laksana 103,5% *)
4. Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi 128,08%
5. Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi, dengan capaian 93,3 %
6. Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksanaan terhadap total rekomendasi, dengan capaian 100%
7. Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun, dengan capaian 100%
8. Persentase advokasi hukum yang diselesaikan, dengan capaian 103,3%
9. Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi, dengan capaian 88,9%

Ket *) Nilai sementara KemenpanRB

Dari ke sembilan indikator di atas, terdapat 5 (lima) indikator dengan kriteria Memuaskan sedangkan capaian 4 (empat) indikator lainnya kurang dan di atas 100 %

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan serta membiayai kegiatan lainnya, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat memperoleh anggaran TA 2018 sebesar Rp10.041.719.000,00 dengan realisasi Rp8.681.036.522,00 (86,44%) pada bulan Januari s.d Juli 2018, namun pada tahun berjalan terjadi perubahan struktur organisasi menjadi Biro Hukum dan Organisasi dengan anggaran sebesar Rp10.451.383.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.282.388.022,00 (88,81%).

Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal untuk mengetahui kinerja Biro Hukum dan Organisasi pada tahun 2018 dan untuk selanjutnya dapat memberi masukan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	5
C. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	10
D. ASPEK STRATEGIS	11
E. SITEMATIKA PENYAJIAN	12
BAB II PERENCANAAN KERJA	13
A. RENCANA STRATEGIS 2015 -2019	13
B. PERJANJIAN KINERJA 2018	23
C. CARA MENGHITUNG PENCAPAIAN INDIKATOR	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	28
B. PENCAPAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP TARGET 2019	35
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	36
BAB IV PENUTUP	41
A. KESIMPULAN	41
B. SARAN	42
LAMPIRAN	

Bab I Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disusun pada setiap akhir tahun guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Berdasarkan Permenpan RB No 53 Tahun 2014 tersebut menggantikan Permenpan No 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP, Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAPKIN) sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan LAKIP.

Sesuai amanat tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diwajibkan menyusun LAPKIN berdasarkan tugas dan fungsi BPOM. Dengan adanya perubahan organisasi BPOM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2018 dan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM maka dilakukan penyusunan LAPKIN Unit Organisasi Biro Hukum dan Organisasi yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2015-2019.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas:

Melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, layanan pengaduan konsumen, dan hubungan masyarakat

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan bantuan hukum;
- c. pelaksanaan layanan pengaduan konsumen;
- d. pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat.



Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Bagan struktur Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dapat dilihat pada Gambar 1. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat membawahi 4 (empat) bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bagian Peraturan Perundang-undangan

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Bagian Peraturan Perundang-undangan terdiri dari:

- a. Subbagian Perumusan Peraturan Perundang-undangan
- b. Subbagian Dokumentasi Hukum

2. Bagian Bantuan Hukum

Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pertimbangan hukum, layanan bantuan hukum dan penyuluhan hukum.

Bagian Bantuan Hukum terdiri dari:

- a. Subbagian Pertimbangan Hukum
- b. Subbagian Layanan Bantuan Hukum
- c. Subbagian Penyuluhan Hukum

3. Bagian Pengaduan Konsumen

Bagian Pengaduan Konsumen mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan melaksanakan kegiatan layanan pengaduan konsumen.

Bagian Pengaduan Konsumen terdiri dari:

- a. Subbagian Layanan Pengaduan Konsumen
- b. Subbagian Data dan Evaluasi Layanan Pengaduan Konsumen
- c. Subbagian Bimbingan Layanan Pengaduan Konsumen

4. Bagian Hubungan Masyarakat

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberitaan, hubungan pers dan media massa serta publikasi dan dokumentasi.

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari:

- a. Subbagian Pemberitaan
- b. Subbagian Media Massa
- c. Subbagian Publikasi dan Dokumentasi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, terjadi perubahan nomenklatur semula Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menjadi Biro Hukum dan Organisasi. Perubahan fungsi meliputi penambahan fungsi penataan organisasi dan tata laksana yang semula berada pada Biro Perencanaan dan Keuangan dan fungsi ketatausahaan serta pengurangan fungsi hubungan masyarakat dan pengaduan masyarakat yang menjadi fungsi Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Biro Hukum dan Hubungan Organisasi mempunyai tugas:

melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi, yaitu:

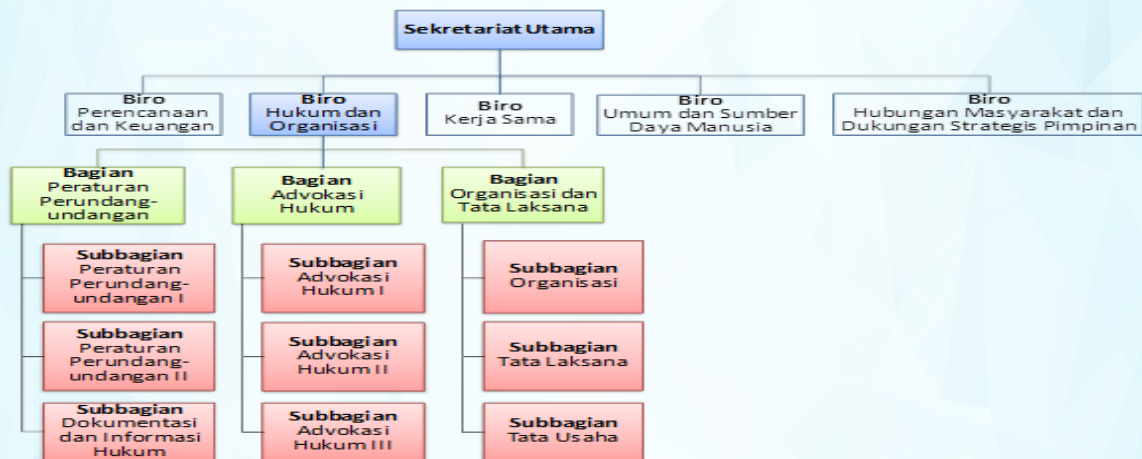
- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta rumusan perjanjian;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan dokumentasi, analisis, dan evaluasi hukum;
- c. Pelaksanaan advokasi hukum;
- d. Penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Dari fungsi Biro Hukum dan Organisasi secara garis besar terdapat 4 (empat) inti kegiatan Biro Hukum dan Organisasi, yakni:

1. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, rumusan perjanjian, analisis dan evaluasi, dokumentasi dan informasi hukum bidang pengawasan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan,

- kosmetik, pangan olahan, penindakan, inspektorat, dan manajemen pengawasan Obat dan Makanan;
2. Koordinasi dan fasilitasi pemberian pertimbangan hukum, penanganan perkara hukum/kasus hukum, pendampingan hukum dalam pemberian keterangan saksi/ahli dan pendampingan pejabat/pegawai di lingkungan BPOM dalam perkara hukum/kasus hukum, serta pemberian konsultasi dan penyuluhan hukum;
 3. Penataan organisasi dan tata laksana melalui evaluasi dan penataan organisasi, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan peta proses bisnis, standar operasional prosedur, dan tata hubungan kerja;
 4. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dengan demikian, Biro Hukum dan Organisasi merupakan salah satu unit organisasi yang berperan strategis dalam menunjang pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan sehingga diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara lebih profesional dan proaktif.



Gambar 2 Struktur Organisasi Biro Hukum dan Organisasi

Bagan struktur Biro Hukum dan Organisasi dapat dilihat pada gambar 2, Biro Hukum dan Organisasi membawahi 3 (tiga) bagian yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Bagian Peraturan Perundang-undangan

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, rumusan perjanjian, analisis dan evaluasi, dokumentasi dan informasi hukum bidang pengawasan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, penindakan, pangan olahan, inspektorat, dan manajemen pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan kajian bidang pengawasan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, dan penindakan, inspektorat, dan manajemen pengawasan Obat dan Makanan;
- c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan rumusan perjanjian bidang pengawasan bidang pengawasan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, penindakan, inspektorat, dan manajemen pengawasan Obat dan Makanan;
- d. pelaksanaan analisis dan evaluasi produk hukum bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- e. pelaksanaan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Peraturan Perundang-undangan terdiri dari:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan I;
- b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan II; dan
- c. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

2. Bagian Advokasi Hukum

Bagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Advokasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan fasilitasi pemberian pertimbangan hukum;
- b. koordinasi dan fasilitasi penanganan perkara hukum/kasus hukum;
- c. koordinasi dan fasilitasi pendampingan hukum dalam pemberian keterangan saksi/ahli dan pendampingan pejabat/pegawai di lingkungan BPOM dalam perkara hukum/kasus hukum; dan
- d. koordinasi dan fasilitasi pemberian konsultasi dan penyuluhan hukum.

Bagian Advokasi Hukum terdiri dari:

- a. Subbagian Advokasi Hukum I;
- b. Subbagian Advokasi Hukum II; dan
- c. Subbagian Advokasi Hukum III.

3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Pengaduan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. evaluasi dan penataan organisasi;
- b. fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan peta bisnis proses, standar operasional prosedur, dan tata hubungan kerja;
- c. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

C. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung tugas-tugas Biro sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang mumpuni. SDM yang dimiliki Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan tahun 2018 sejumlah 58 (lima puluh enam) pegawai terdiri atas ASN dan Non ASN.

Adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM, Biro Hukum dan Organisasi didukung 40 pegawai terdiri atas 23 pegawai ASN dan 17 pegawai Non ASN. Berkurangnya jumlah pegawai tersebut dikarenakan terdapat 2 (dua) bagian yaitu Bagian Pengaduan Konsumen dan Bagian Hubungan Masyarakat pindah ke dalam Unit Kerja Biro Humas dan Dukungan Strategis Pimpinan.

Dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis merupakan tantangan bagi Biro Hukum dan Organisasi untuk dapat memprediksi kebutuhan SDM dalam rangka menghadapi dinamika lingkungan strategis tersebut. Adapun proyeksi kebutuhan SDM Biro Hukum dan Organisasi sampai dengan tahun 2024 untuk mendukung tugas dan fungsinya sebesar 86 pegawai.

2. SARANA DAN PRASARANA

Biro Hukum dan Organisasi telah didukung dengan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas antara lain:

- a. Ruang Kerja yang terdiri atas Ruang Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Ruang Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Kepala Bagian Advokasi Hukum, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Peralatan, meubelair dan kelengkapan lain dalam melaksanakan aktivitas;
- c. Ruang Rapat Biro Hukum dan Organisasi;
- d. Peralatan, meubelair, dan perangkat lainnya.

3. ANGGARAN

Anggaran Biro Hukum dan Humas yang dipertanggungjawabkan pada tahun 2018 sebesar Rp10.041.719.000,00 dengan realisasi Rp8.681.036.522,00 (86,44%) pada bulan Januari s.d Juli 2018.

Namun pada tahun berjalan terjadi perubahan struktur organisasi yang baru menjadi Biro Hukum dan Organisasi dengan anggaran sebesar Rp10.451.383.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.282.388.022,00 (88,81%).

D. ASPEK STRATEGIS

Pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai harapan. Isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi sebagai berikut:

1. Penguatan dasar hukum pengawasan obat dan makanan melalui pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
2. Penguatan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan diperlukan meliputi beberapa aspek pengendalian proses maupun dokumen serta batas waktu yang harus dilaksanakan unit teknis dikoordinasikan Biro Hukum dan Organisasi.
3. Penguatan Advokasi Hukum di bidang pengawasan obat dan makanan.
Sebagai unit kerja yang membidangi advokasi hukum dituntut perannya dalam mendukung agar setiap kebijakan hukum BPOM selalu didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengingat luasnya wilayah kerja dan sektor yang menjadi tanggung jawab BPOM dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan.
4. Penataan dan penguatan kelembagaan baik terhadap dimensi struktur organisasi dan proses organisasi untuk mewujudkan organisasi BPOM yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran.
5. Penataan dan penguatan tata laksana melalui penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang diintegrasikan dengan penerapan ISO 17025:2017 untuk Laboratorium Pengujian/Kalibrasi.
6. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi untuk peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi BPOM.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan

Makanan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum dan Organisasi tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
Bab ini membahas mengenai latar belakang, tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya manusia organisasi dan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi
- BAB II : PERENCANAAN KINERJA**
Bab ini membahas mengenai rencana strategis, perjanjian kinerja tahun 2018.
- BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**
Bab ini menerangkan mengenai capaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi tahun 2018, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran 2018.
- BAB IV : PENUTUP**
Bab ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh atas capaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi serta menguraikan permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja serta strategi pemecahannya yang akan dilaksanakan untuk peningkatan kinerja dimasa datang.

Bab II Perencanaan Kerja

A. RENCANA STRATEGIS 2015 -2019

Sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagai unit pendukung yang berada di bawah Sekretariat Utama dalam menunjang tugas pokok BPOM, maka Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat memiliki visi dan misi yang sama dengan visi dan misi BPOM dan Settama sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.



Gambar 1. Visi, Misi dan Tujuan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Tabel 1. Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Utama Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator
Obat dan makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa.	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat; Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat dan makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan; Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM. 	<ol style="list-style-type: none"> Tersusunnya peraturan perundang-undangan yang efektif; Terwujudnya layanan bantuan hukum, komunikasi, informasi, dan edukasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. 	Sasaran Strategis/ Sasaran Program 1: Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat pengawasan obat dan makanan.*)	1.1 Jumlah Peraturan Kepala BPOM yang diundangkan.*)
			Sasaran Strategis/ Sasaran Program 2: Meningkatnya partisipasi masyarakat dan efektivitas kerjasama; *)	2.1 Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan;*) 2.2 Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti.*)
			Sasaran Strategis/ Sasaran Program 3: Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM dalam manajemen hukum. *)	3.1. Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti*)
			Sasaran Kegiatan 1: Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan obat dan makanan. **)	1.1 Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun. **)
			Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya kualitas layanan komunikasi, informasi, dan edukasi obat dan makanan. **)	2.1 Jumlah informasi obat dan makanan yang dipublikasikan;**)
			Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya layanan pertimbangan hukum, penyuluhan hukum dan bantuan hukum.**)	2.2 Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen yang ditindaklanjuti. **)
				3.1 Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan.**)

Keterangan:

*) Sasaran Strategis/ Sasaran Program dan Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program Sektama

**) Sasaran Kegiatan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Berdasarkan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan di atas, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat 2015 sampai dengan tahun 2019 meliputi:

- Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun sebanyak 850 rancangan;

2. Jumlah informasi obat dan makanan yang dipublikasikan sebesar 495 informasi;
3. Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen yang ditindaklanjuti sebanyak 51.000 layanan;
4. Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan sebanyak 785 layanan.

IKU Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat tersebut telah diformalkan dalam bentuk Keputusan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Nomor HK.04.23.01.18.0023 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Tahun 2015-2019.

Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM, Biro Hukum dan Organisasi menyusun Revisi Renstra Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan.

Revisi Renstra Biro Hukum dan Organisasi ini berpedoman pada Revisi Renstra Sekretariat Utama Tahun 2015-2019 dan Revisi Renstra BPOM Tahun 2015-2019. Revisi Renstra Biro Hukum dan Organisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Biro Hukum dan Organisasi dibandingkan dengan pencapaian dari periode sebelumnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



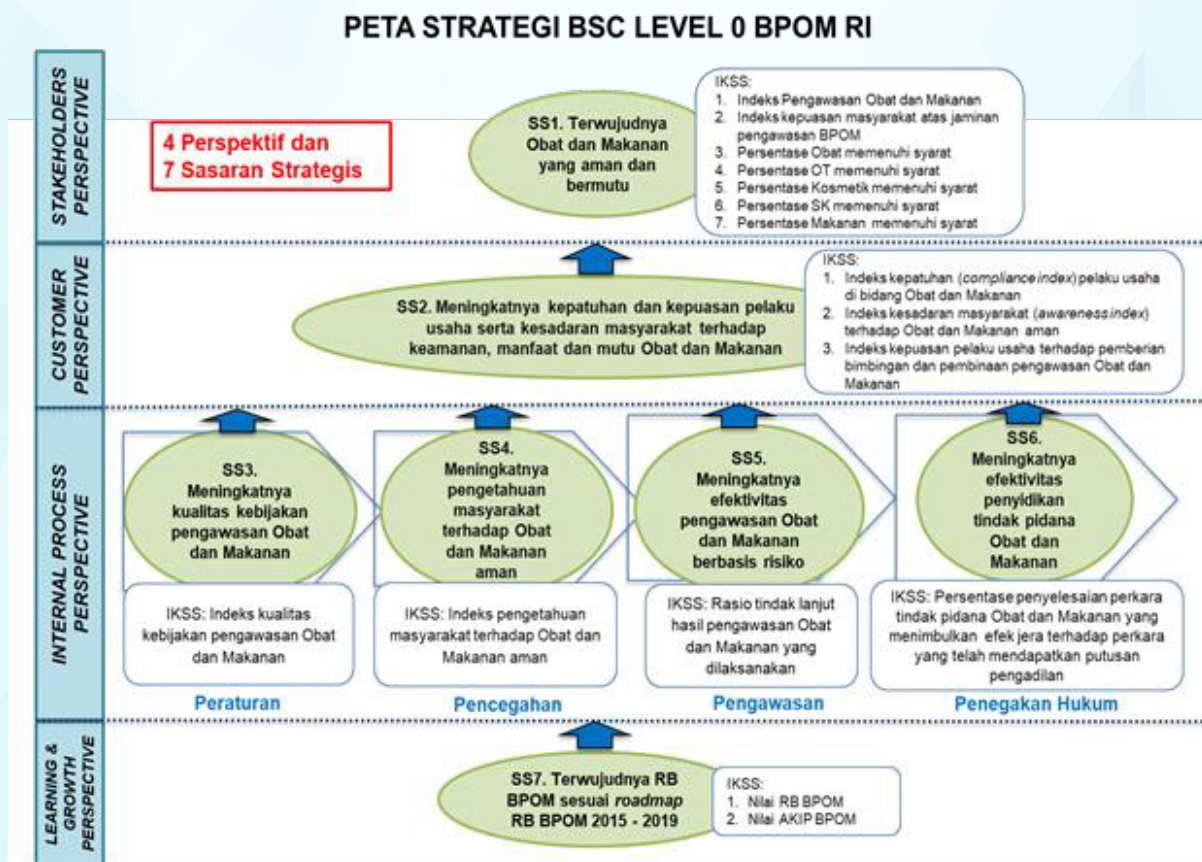
Gambar 2. Visi, Misi dan Tujuan Biro Hukum dan Organisasi

A.1 TUJUAN STRATEGIS

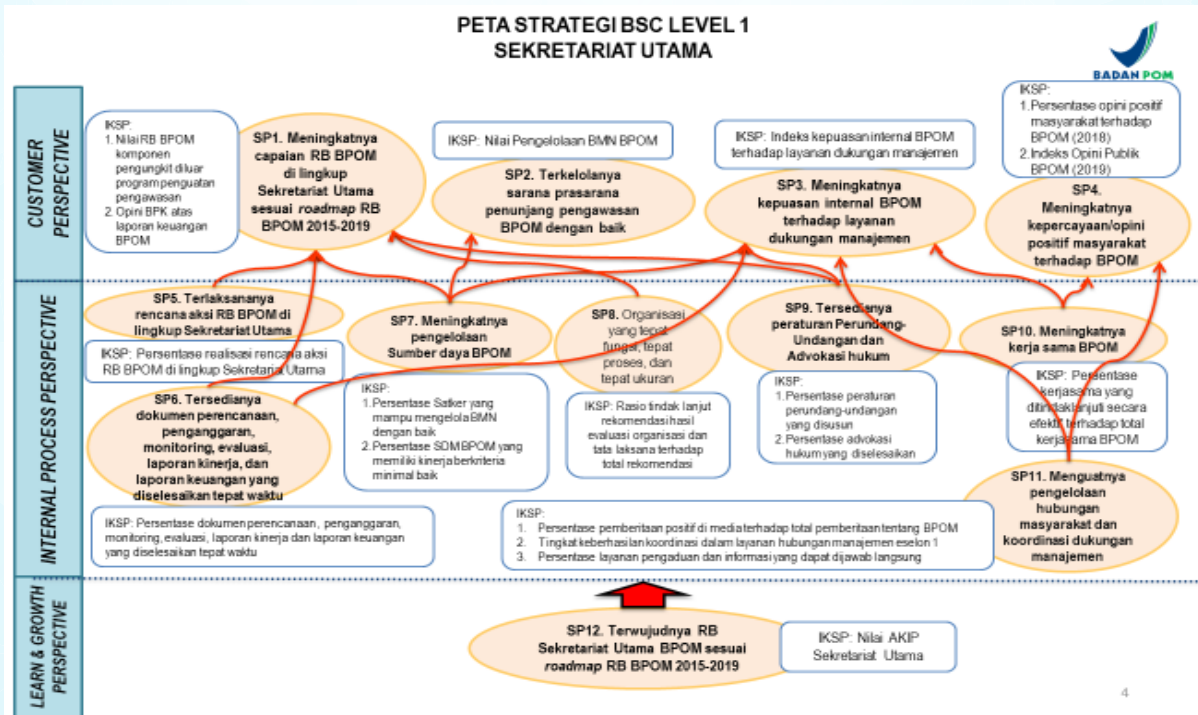
Tujuan Organisasi dirumuskan sebagai bentuk yang lebih terarah dan bersifat operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi. Tujuan strategis Biro Hukum dan Organisasi adalah Terwujudnya penataan peraturan perundang-undangan, layanan advokasi hukum yang terselesaikan, dan penguatan organisasi dan tata laksana.

A.2 SASARAN STRATEGIS

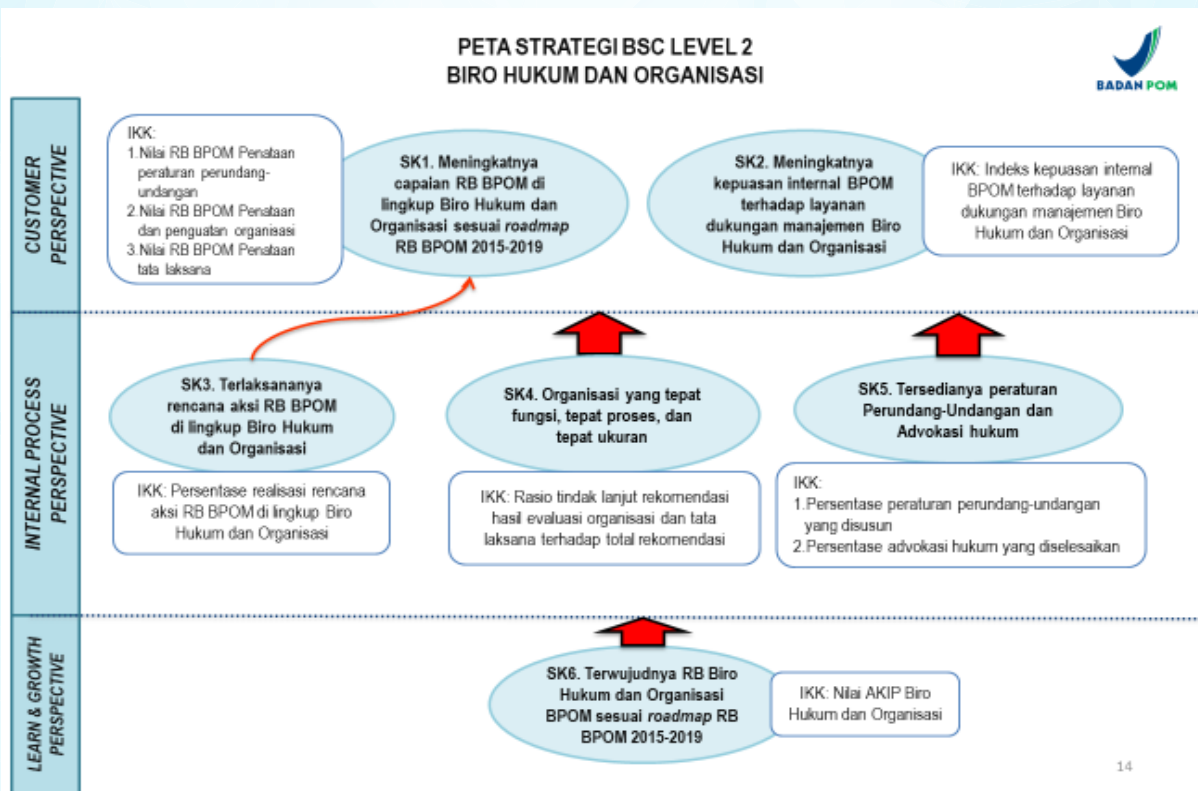
Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi serta tujuan yang ingin dicapai Biro Hukum dan Organisasi, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Sasaran strategis ini disusun berdasarkan Peta Strategi Level 2 Biro Hukum dan Organisasi yang diturunkan dari Peta Strategi level 1 dan Level 0, yaitu:



Gambar 3. Peta Strategi Level 0 BPOM



Gambar 4. Peta Strategi Level 1 Sekretariat Utama



Gambar 5. Peta Strategi Level 2 Biro Hukum dan Organisasi

Sasaran Strategis Biro Hukum dan Organisasi yaitu:

SK1

Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi sesuai *Roadmap* RB BPOM 2015-2019

Biro Hukum dan Organisasi bertanggungjawab terhadap pencapaian nilai RB BPOM yang terkait Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan Organisasi dan Penataan Tata Laksana. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

Tabel 2. Indikator Kegiatan

NO	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1.	Nilai RB BPOM Penataan Peraturan Perundang-undangan	2,85
2.	Nilai RB BPOM Penataan dan Penguatan Organisasi	4,15
3.	Nilai RB BPOM Penataan Tata Laksana	4,00

SK 2

Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi

Dalam sebuah organisasi, kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting tidak hanya untuk pelanggan eksternal tetapi juga untuk pelanggan internal. Pelayanan terhadap pelanggan internal menjadi sangat penting karena menentukan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Kualitas pelayanan internal akan menjadi salah satu dasar dalam pencapaian tujuan organisasi. Jika pelayanan terhadap pelanggan internal terhambat maka akan menghambat kinerja organisasi, demikian pula sebaliknya. Untuk itu Biro Hukum dan Organisasi sebagai unit organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Pelaksanaan Advokasi Hukum, serta Pembinaan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana. Biro Hukum dan Organisasi berupaya memberikan layanan dukungan manajemen seoptimal mungkin untuk mampu memberikan kepuasan bagi pelanggan internalnya untuk mampu berkinerja secara optimal. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

Tabel 3. Indikator Kegiatan

NO	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1.	Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Dukungan Manajemen Biro Hukum dan Organisasi	60

SK 3
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi

Dalam mendukung RB BPOM, Biro Hukum dan Organisasi memiliki peran dan tanggungjawab terhadap 3 (tiga) area perubahan RB dari 8 (delapan) area perubahan RB, antara lain area perubahan Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi dan Penataan Tata Laksana.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

Tabel 4. Indikator Kegiatan

NO	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1.	Terlaksananya rencana aksi RB di Lingkup Biro Hukum dan Organisasi	100%

SK 4
Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukur

Penguatan kelembagaan/organisasi merupakan hal mendasar untuk mendukung pencapaian tujuan BPOM. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

Tabel 5. Indikator Kegiatan

NO	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1.	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukur	100%

SK 5
Tersedianya Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Salah satu subsistem itu adalah standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. Biro Hukum dan Organisasi perlu mengawal pemenuhan regulasi/standar sesuai dengan rencana pelaksanaan dalam kerangka regulasi. Peran Biro Hukum dan Organisasi sangat strategis untuk menjaga harmonisasi setiap peraturan perundang-undangan sehingga tidak berbenturan dan

duplikasi serta mendorong rancangan standar/regulasi menjadi produk hukum yang siap diundangkan. Biro Hukum dan Organisasi perlu memperkuat fungsinya dalam menilai dampak peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan bagi masyarakat.

Dalam mendukung pelaksanaan pengambilan kebijakan hukum dan penegakan hukum, Biro Hukum dan Organisasi berperan dalam hal pemberian advokasi hukum, termasuk menangani perkara hukum yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

Tabel 6. Indikator Kegiatan

NO	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1.	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang disusun	100%
2.	Persentase Advokasi Hukum yang diselesaikan	100%

SK 6

Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi BPOM sesuai dengan Roadmap RB BPOM 2015-2019

Biro Hukum dan Organisasi memiliki tanggungjawab terhadap pemenuhan RB, dalam hal ini adalah terkait pemenuhan akuntabilitas kinerja tingkat entitas Unit Organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemenuhan RB Biro Hukum dan Organisasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan manajemen kinerja yang akan berdampak pada peningkatan kualitas kinerja Biro Hukum dan Organisasi.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

Tabel 7. Indikator Kegiatan

NO	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1.	Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi	78

Adapun ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Biro Hukum dan Organisasi periode 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 8. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator (OTK Baru)

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa	1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat 2. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM	Terwujudnya penataan peraturan perundang-undangan, layanan advokasi hukum yang terselesaikan, dan penguatan tata laksana organisasi	Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi sesuai <i>Roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	1. Nilai RB BPOM Penataan Peraturan Perundang-undangan 2. Nilai RB BPOM Penataan dan Penguatan Organisasi 3. Nilai RB BPOM Penataan Tata Laksana
			Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	4. Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi
			Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi	5. Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi
			Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	6. Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Organisasi dan Tata Laksana terhadap total rekomendasi
			Tersedianya peraturan Perundang-undangan	7. Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun
				8. Persentase advokasi

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
				hukum yang diselesaikan
			Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi BPOM sesuai road map RB BPOM 2015-2019	9. Nilai AKIP Biro dan Organisasi

Kesembilan indikator pada tabel 9 ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Hukum dan Organisasi 2015-2019 sesuai dengan lampiran 12.

Biro Hukum dan Organisasi telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 baik OTK lama maupun OTK baru perubahan tersebut mempengaruhi adanya perubahan indikator. Perubahan indikator tersebut dikarenakan adanya perubahan dalam pembagian tugas dan fungsi baik pusat maupun Balai Besar/Balai POM yang berdampak pada perubahan output yang dihasilkan dalam rangka mencapai organisasi yang berorientasi pada *outcome*.

Indikator yang ditetapkan Biro Hukum dan Organisasi adalah indikator yang berorientasi *outcome*. Kualitas regulasi yang telah ditetapkan BPOM tetap menjadi perhatian pada setiap dokumen yang disusun. Mengingat dalam setiap tahapan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan memerlukan pembahasan baik dari internal maupun eksternal organisasi sehingga diharapkan dokumen yang disusun sesuai kaidah yang berlaku.

B. PERJANJIAN KINERJA 2018

Setelah DIPA BPOM Tahun 2018 disahkan, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2018 adalah Rencana Kinerja Tahunan 2018 pada OTK lama dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2018 yang telah disahkan dan setelah dikeluarkannya Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja dibuat kembali Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 sesuai dengan adanya perubahan struktur tersebut. Adapun perubahan Perjanjian Kinerja terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 9. Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Januari s.d Februari Tahun 2018 (OTK Lama)**

Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja 2018
Meningkatnya kuantitas dan Kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat pengawasan obat dan makanan	1. Jumlah Peraturan Kepala BPOM yang diundangkan	25 peraturan
	2. Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun	200 rancangan
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan	220 layanan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan efektivitas kerjasama	1. Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap obat dan makanan	Baik
	2. Persentase Pengaduan Konsumen yang ditindaklanjuti	75 %
Meningkatnya kualitas layanan komunikasi, informasi, dan edukasi obat dan makanan	1. Jumlah informasi obat dan makanan yang dipublikasikan	126 Informasi
	2. Jumlah layanan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	17.500 Layanan

**Tabel 10. Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi
Maret s.d Juli Tahun 2018**

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja 2018
Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	2,85
	Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	4,15
	Nilai RB BPOM penataan tata laksana	4,00
Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	60
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di Biro Hukum dan Organisasi	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi	100
Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana	100

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja 2018
tepat ukuran	terhadap total rekomendasi	
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100
	Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100
Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi sesuai dengan road map RB BPOM 2015- 2019	Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi	78

Tabel 11. Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Agustus s.d Desember Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja 2018
Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	2,85
	Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	4,15
	Nilai RB BPOM penataan tata laksana	4,00
Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	60
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di Biro Hukum dan Organisasi	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi	100
Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	100
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100
	Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja 2018
Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi sesuai dengan road map RB BPOM 2015- 2019	Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi	78

C. PAGU ANGGARAN

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen Kepala Unit Organisasi yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dengan anggaran pada tahun 2018 Biro Hukum dan Humas sebesar Rp4.764.446.000,00 namun pada tahun bulan Maret dan sampai dengan Juli anggaran yang digunakan menggunakan DIPA Biro Hukum dan Humas dan seiringnya tahun berjalan terjadi Biro Hukum dan Organisasi dengan anggaran sesuai DIPA OTK baru yang dikeluarkan pada bulan Juli 2018 sehingga terjadi perubahan anggaran sebesar Rp10.451.383.000,00.

D. CARA MENGHITUNG PENCAPAIAN INDIKATOR

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja:

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100\% < \chi \leq 125\%$
Baik	100%
Cukup	$75\% \leq \chi < 100\%$
Kurang	$\chi < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$\chi > 125\%$

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra 2015-2019. Laporan kinerja tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai evaluasi kegiatan yang berjalan selama tahun 2018 dan dapat dijadikan masukan untuk perbaikan perencanaan sampai dengan akhir periode Renstra. Evaluasi yang dilakukan pada 6 (enam) sasaran kegiatan dengan 9 (sembilan) indikator termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan seperti dijabarkan pada BAB II.

1.1. CAPAIAN SASARAN

Perspective / Sasaran Kegiatan	Nilai Pencapaian Sasaran	Kriteria
A. Customer Perspective		
1. Meningkatnya Capaian RB BPOM di Lingkungan Biro Hukum dan Organisasi sesuai roadmap RB 2015-2019	104,75	Memuaskan
2. Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	129,01%	Tidak Dapat Disimpulkan
B. Internal Process Perspective		
1. Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di Biro Hukum dan Organisasi	93,3%	Cukup
2. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	100%	Baik
3. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	100%	Baik
C. Learning and Growth Perspective		

Perspective / Sasaran Kegiatan	Nilai Pencapaian Sasaran	Kriteria
Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	88,9%	Cukup

Setelah diterbitkannya Peraturan BPOM Nomor 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Biro Hukum dan Organisasi memiliki 9 (sembilan) indikator sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama Biro Hukum dan Organisasi di masing-masing sasaran kegiatan Tahun 2018. Pencapaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi selama tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 12. Pencapaian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2018 (OTK Baru)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2017	KINERJA 2018				Capaian 2018 terhadap 2017	Target Rev Renstra 2019	Realisasi 2018 thdp 2019
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA			
Meningkatnya Capaian RB BPOM di Lingkungan Biro Hukum dan Organisasi sesuai roadmap RB 2015-2019	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	2,71	2,85	2,91 *)	102,1%	Memuaskan	107,3	3,00	103,9% *)
	Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	4,51	4,15	4,51 *)	108,67%	Memuaskan	100	4,30	95,34 *)
	Nilai RB BPOM penataan tata laksana	3,92	4,00	4,14 *)	103,5%	Memuaskan	105,6	4,30	103,8% *)

Ket *) adalah hasil sementara

Tabel 12 diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi indikator kinerja pada tahun 2018 hasil evaluasi sementara KemenPANRB pada tanggal 31 Oktober 2018, capaian **Nilai RB Penataan Peraturan Perundang-Undangan** sebesar 102%, capaian **Penataan Penguatan Organisasi** sebesar 108,67% dan capaian **Penataan Tata Laksana** sebesar 103,5%. 3 Indikator tersebut adalah memuaskan, indikator ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2017.

Dibandingkan dengan target tahun 2019 adalah **Nilai RB Penataan Peraturan Perundang-Undangan** 3,00 (103,9%), **Nilai Penataan Penguatan Organisasi** 4,30 (95,34%) dan **Nilai**

Penataan Tata Laksana 4,30 (103,8%) sehingga 2 Indikator mencapai kriteria memuaskan, sedangkan 1 indikator mencapai kriteria cukup.

Kunci keberhasilan 3 indikator tersebut di atas adalah Komitmen dari unit organisasi untuk melaksanakan roadmap Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sudah kuat. Berdasarkan hasil monitoring pencapaian roadmap RB, sebagian besar kegiatan yang telah direncanakan dalam roadmap RB telah terealisasi. Namun, bila dibandingkan dengan target tahun 2019 ada 1 indikator yang mencapai kriteria cukup dikarenakan dalam penetapan target terlalu rendah tetapi output yang dihasilkan meningkat sehingga akan dilakukan reviu target pada tahun 2020.

Tabel 13. Pencapaian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2018 (OTK Baru)

Saasaran Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2017	KINERJA 2018				Realisasi 2018 terhadap 2017	Target Rev Renstra 2019	Realisasi 2018 thdp 2019
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA			
Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	-	60	77,41	129,01%	Tidak Dapat disimpulkan	-	61	126,90%

*Ket *) adalah hasil sementara

Tabel 13 di atas menunjukkan bahwa realisasi target indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi tahun 2018 adalah 77,41. Realisasi tersebut melebihi target yang ditentukan tahun 2018 sebesar 60. Hal ini menunjukkan capaian realisasi sebesar 129,01%, dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Penetapan target indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi merupakan *baseline* sebagai dasar awal target yang ditetapkan dan akan dilakukan review target pada tahun 2020 dengan memperhatikan baseline data hasil capaian indikator tahun 2018 dimana target 2019 telah tercapai di tahun 2018.

Tabel 14. Pencapaian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2018 (OTK Baru)

Saasaran Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2017	KINERJA 2018				Realisasi 2018 terhadap 2017	Target Rev Renstra 2019	Realisasi 2018 thdp 2019
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA			
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di Biro Hukum dan Organisasi	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi	-	100%	93,3%	93,3%	Cukup	-	100%	100%

Tabel 14 di atas menunjukkan bahwa realisasi target persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi tahun 2018 merupakan realisasi rencana aksi RB bidang penataan peraturan perundang-undangan sebesar 80%, bidang penataan dan penguatan organisasi sebesar 100% dan bidang penataan dan penguatan tata laksana 100%, sehingga rata-rata realisasi adalah 93,3%. Capaian realisasi tersebut sebesar 93,3% kurang dari target yang ditentukan tahun 2018 sebesar 100% dengan kriteria **Cukup**. Hal ini disebabkan terdapat rencana aksi RB bidang penataan peraturan perundang-undangan yang belum dilaksanakan secara optimal yaitu melakukan pertemuan konsultasi dalam setiap proses penyusunan peraturan. Perlu memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan rencana aksi RB bidang penataan peraturan perundang-undangan sesuai dengan *roadmap*.

Tabel 15. Pencapaian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2018 (OTK Baru)

Saasaran Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2017	KINERJA 2018				Realisasi 2018 terhadap 2017	Target Rev Renstra 2019	Realisasi 2018 thdp 2019
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA			
Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	-	100%	100%	100%	Baik	-	100%	100%

Rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana merupakan rekomendasi hasil evaluasi program penataan dan penguatan organisasi serta program penataan tata laksana

yang diberikan kepada BPOM oleh Kementerian PANRB, BPK, KPK, dan/atau lembaga sertifikasi ISO 9001 2001:2015. Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi dihitung dengan membandingkan jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi.

Target rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana yang diukur berdasarkan indikator ini dapat direalisasikan 100% sesuai target sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase capaian target adalah 100% atau berkriteria **Baik**. Pengukuran kinerja menggunakan indikator ini mulai ditetapkan tahun 2018.

Capaian 100% dipengaruhi oleh tindak lanjut yang dilakukan BPOM atas 2 (dua) rekomendasi dari Kementerian PANRB yang merupakan 2 (dua) output dari kegiatan penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana sebagai berikut:

1. Peta proses bisnis BPOM mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
2. Laporan hasil evaluasi kelembagaan BPOM mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

Berkaitan dengan kegiatan penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana, pada tahun 2018 BPOM telah melaksanakan:

1. Penyusunan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM;
2. Penyusunan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM (dasar pembentukan 40 Loka POM di Kabupaten/Kota);
3. Penyusunan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.1.223.06.18.3195 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) ISO 9001:2015 BPOM (memuat peta proses bisnis, peta relasi, peta subproses bisnis, peta lintas fungsi, dan daftar rekapitulasi SOP Makro BPOM);
4. Sertifikasi ISO 9001:2015 atas BPOM sebagai entitas lembaga, 28 (dua puluh delapan) unit kerja pusat, dan 32 (tiga puluh dua) UPT Balai Besar/Balai POM.

Kegiatan-kegiatan tersebut menunjang keberhasilan pencapaian sasaran “organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran”. Upaya peningkatan tahun 2019 terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dilakukan melalui pembangunan instrumen evaluasi kelembagaan berbasis elektronik dan integrasi sistem mutu BPOM berdasarkan ISO 9001:2015 dengan ISO/IEC 17025:2017.

Tabel 16. Pencapaian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2018 (OTK Baru)

Saasaran Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2017	KINERJA 2018				Realisasi 2018 terhadap 2017	Target Rev Renstra 2019	Realisasi 2018 thdp 2019
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA			
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	-	100%	100,45%	100,45%	Memuaskan	100%	100,45%	
	Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	-	100%	103%	103%	Memuaskan	100%	103%	

Kegiatan tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum mempunyai 2 (dua) indikator yaitu:

1. Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun

Rancangan peraturan perundang-undangan meliputi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan BPOM, Rancangan Keputusan Kepala BPOM (yang bersifat mengatur), Naskah Perjanjian Kerja Sama.

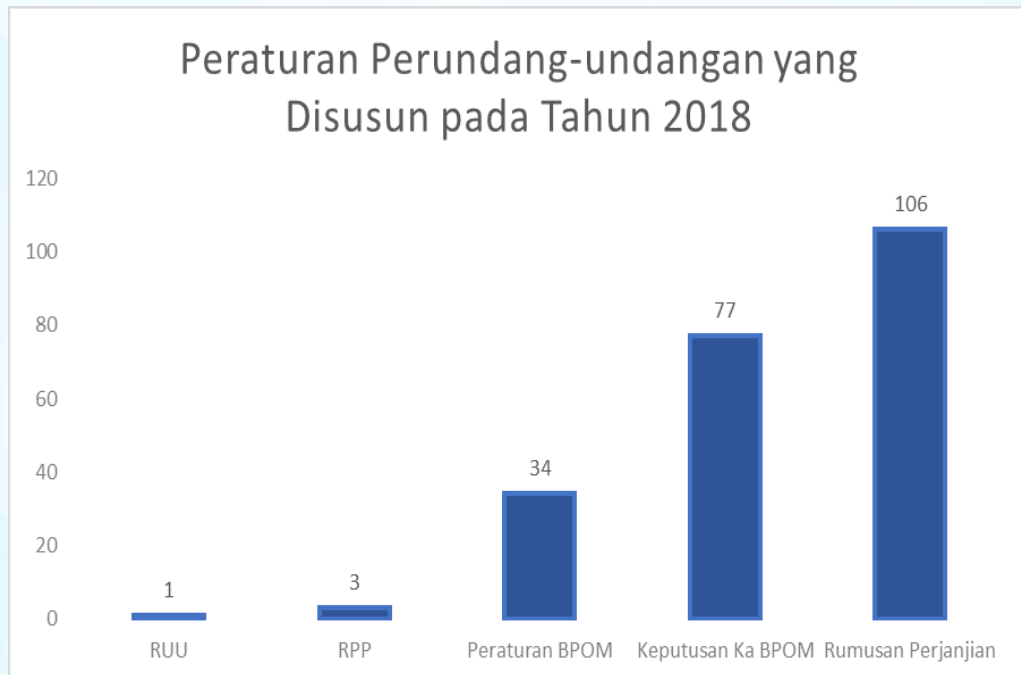
Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun dapat dihitung dengan membandingkan perundangan-undangan yang selesai disusun terhadap rancangan perundang-undangan yang diterima.

Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 100,45%. Selama tahun 2018, BPOM telah melakukan penyusunan 1 (satu) Rancangan Undang-Undang, 3 (tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah, 34 (tiga puluh empat) Peraturan BPOM, 72 (tujuh puluh dua) Keputusan Kepala BPOM, dan 110 (seratus sepuluh) Naskah Perjanjian Kerja Sama.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah BPOM telah melaksanakan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian besar peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron. Identifikasi dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. BPOM memiliki sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/Policy Paper, dan Paraf Koordinasi.

Upaya peningkatan tahun 2019 terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dilakukan melalui pengkajian dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan, pelaksanaan konsultasi publik, simplifikasi regulasi (pencabutan, revisi/perubahan), dan pengembangan sistem pengendalian penyusunan peraturan

perundangan serta peningkatan kompetensi SDM penyusunan peraturan perundang-undangan.



2. Persentase advokasi hukum yang diselesaikan pada tahun 2018 dapat dihitung dengan membandingkan jumlah layanan advokasi yang ditindaklanjuti terhadap jumlah permintaan advokasi yang diterima.

Persentase Advokasi Hukum yang diselesaikan mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 103,3%. Selama tahun 2018, BPOM telah melakukan 103 (seratus tiga) Layanan Pertimbangan Hukum, 101 (seratus satu) Layanan Penanganan Perkara, dan 105 (seratus lima) Layanan Penyuluhan Hukum.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah BPOM telah melakukan pertimbangan hukum terkait permasalahan pengawasan di bidang obat dan makanan, penanganan perkara/biaya penyelesaian perkara, pemberian advokasi hukum dan penyuluhan hukum serta koordinasi pelaksanaan penanganan perkara/gugatan hukum BPOM.

Upaya peningkatan tahun 2019 terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dilakukan melalui pembangunan aplikasi penunjukan saksi/ahli (SIKOFI-OM) dan peningkatan kompetensi SDM dalam penanganan perkara.



Tabel 17. Pencapaian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2018 (OTK Baru)

Saasaran Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2017	KINERJA 2018				Realisasi 2018 terhadap 2017	Target Rev Renstra 2019	Realisasi 2018 thdp 2019
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA			
Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi sesuai dengan road map RB BPOM 2015-2019	Nilai Akip Biro Hukum dan Organisasi	-	78	69,32	88,9%	Cukup	-	81	116,8%

Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi diperoleh berdasarkan nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dengan 5 komponen penilaian yaitu Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (25%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Kinerja (10%) dan Pencapaian Kinerja (20%).

Realisasi target Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2018 adalah 69,32. Realisasi tersebut kurang dari target yang ditentukan tahun 2018 sebesar 78. Hal ini menunjukkan capaian realisasi sebesar 88,9%, dengan kriteria **Cukup**. Nilai ini merupakan Nilai AKIP Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Tahun 2017 (OTK lama). Tindaklanjut pencapaian

B. PENCAPAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP TARGET 2019

Pencapaian realisasi masing-masing indikator kinerja Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat pada tahun 2016, 2017 dan 2018 (OTK lama) tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2018 dan target 2019 (OTK baru) dikarenakan asaran Kegiatan dan Indikator pada Biro Hukum dan Organisasi merupakan indikator baru yang bersifat *outcome*.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mendukung Sasaran Program Dukungan Manajemen pada tahun 2018 Biro Hukum dan Humas mendapatkan anggaran sebesar Rp10.041.719.000,00 dengan realisasi Rp8.681.036.522,00 (86,44%) sampai dengan bulan Juli 2018. Dengan adanya perubahan struktur organisasi menjadi Biro Hukum dan Organisasi mendapatkan anggaran sebesar Rp10.451.383.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.282.388.022,00 (88,81%), yang dapat dilihat pada tabel 19 dan 20 di bawah ini:

Tabel 18. Realisasi Anggaran Kegiatan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Tahun 2018 (OTK lama) Sampai dengan Juli

No	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Informasi obat dan makanan yang dipublikasikan	4.436.283.000	3.917.791.498	88,31%
2	Jumlah Layanan bantuan hukum yang diberikan	1.356.281.000	1.290.906.210	95,17%
3	Jumlah Rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat	2.077.855.000	1.430.450.767	68,84%
4	Jumlah Layanan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	2.171.300.000	2.041.888.047	94,03%
TOTAL		10.041.719.000	8.681.036.522	86,44%

Ket : Sumber Data money DJA

Tabel 19. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2018 (OTK baru) Juli sampai dengan Desember 2018

No	Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	5.690.955.000	4.850.722.595	85,23%
2	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran	2.553.519.000	2.400.787.863	94,02%

No	Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
3	Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi sesuai dengan road map RB BPOM 2015-2019	3.060.351.000	2.030.877.200	92,02%
TOTAL		10.451.383.000	9.282.388.022	88,81%

Tabel 20. Anggaran dan Realisasi per sasaran Tahun 2018 (OTK Baru)

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100%	100,45	100,45%	4.693.794.000	3.934.078.159	84%
		Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100%	103,3	103,3%	997.161.000	916.644.800	91,93%
2	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	100%	100%	100%	2.553.519.000	2.400.787.863	94,02

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran pertama yaitu tersedianya Peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum dengan indikator Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun. Realisasi anggaran yang kurang optimal disebabkan adanya perubahan jadwal kegiatan yang

berdampak pada perubahan perencanaan kegiatan dan perubahan sumber pembiayaan kegiatan nasional yang awalnya direncanakan menggunakan sumber anggaran DIPA Satker Sekretariat Utama BPOM diubah menjadi kegiatan terpadu yang menggunakan sumber anggaran DIPA Satker masing-masing Balai Besar/Balai POM sebagai peserta kegiatan.

Upaya yang dilakukan agar realisasi anggaran lebih optimal antara lain:

- a. Menyusun *Plan of Action* (PoA) pada awal tahun anggaran dan dipatuhi pada pelaksanaannya;
- b. Melakukan monitoring berkala secara lebih ketat atas pencapaian kinerja dan realisasi anggaran kegiatan sesuai sasaran dalam Perjanjian Kinerja;
- c. Menyusun perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya;
- d. Menyusun perencanaan tidak hanya *bussiness as usual*, namun perlu *breakthrough* sehingga *output* dan *outcome* dapat tercapai dengan keterbatasan sumber daya.

1. Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Dana

Pada Biro Hukum dan Organisasi Efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh. Berdasarkan perhitungan pengukuran efisiensi kegiatan, dapat dilihat pada lampiran

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari satu kegiatan, diukur dari kemampuan suatu kegiatan menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar, atau presentase capaian *output* sama/lebih tinggi dari pada presentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi diperoleh dengan membagi persen capaian *output* terhadap persen capai *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang akan dijadikan standar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu), yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned}
 SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\
 &= \frac{100\%}{100\%} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
 Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tabel 21. Kategori Efisiensi

Kategori Efisiensi	Jumlah Kegiatan
Ekstrem Efisien ($TE > 0,5$)	11
Efisien	17
Tidak Terealisasi	0

Terdapat beberapa kegiatan dengan indeks efisiensi di atas 1,50 sehingga memiliki tingkat efisiensi lebih dari 0,5 antara lain:

- Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan ($TE = -0,33$)
- Pelaksanaan Operasional Peraturan Perundang-undangan ($TE = -0,04$)
- Kajian Simplifikasi Peraturan Perundang-undangan ($TE = -3,32$)
- Pembahasan Masukan terhadap Draft RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan ($TE = 3,32$)
- Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan ($TE = 0,34$)

- f. Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (TE = 0,17)
- g. Penyelarasan dan Pengawasan Penyusunan NSPK/Peraturan Perundang-undangan terkait Obat dan Makanan (TE = 0,80)
- h. Penyuluhan Hukum/Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Unit Pelaksana Teknis Pusat dan BBPOM (TE = 0,12)

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas terealisasi, namun pencapaian output lebih besar daripada input dikarenakan pada sasaran pertama ada beberapa kegiatan dimana anggarannya dibintangi sehingga tidak dapat dilaksanakan sampai dengan TW II. Untuk Tingkat efisiensi yang tinggi ini disebabkan penganggaran komponen belum memperhatikan tingkat prioritas/urgensi dalam mencapai output yang ditargetkan sesuai data Lampiran 14.

Bab IV Penutup

A. KESIMPULAN

Untuk mencapai tujuan strategis Biro Hukum dan Organisasi 2015-2019, telah ditetapkan 6 (enam) Sasaran Kegiatan yang pencapaiannya diukur dengan 9 (sembilan) indikator kinerja, dan 3 (tiga) di antaranya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Capaian Sasaran Strategis pada Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan pertama “Meningkatnya Capaian RB BPOM di Lingkungan Biro Hukum dan Organisasi sesuai roadmap RB 2015-2019” berhasil dicapai dengan nilai 104,75%, dengan kriteria **Memuaskan**
2. Sasaran Kegiatan kedua “Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi” berhasil dicapai dengan nilai 129,01%, dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.
3. Sasaran Kegiatan ketiga “Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di Biro Hukum dan Organisasi” berhasil dicapai dengan nilai 93,3%, dengan kriteria **Cukup**.
4. Sasaran Kegiatan keempat “Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran” berhasil dicapai dengan nilai 100%, dengan kriteria **Memuaskan**.
5. Sasaran Kegiatan kelima “Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum” berhasil dicapai dengan nilai 156,95%, dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.
6. Sasaran Kegiatan keenam “Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi sesuai *roadmap* RB BPOM 2015-2019” berhasil dicapai dengan nilai 88,9%, dengan kriteria **Cukup**.
7. Pada tahun 2018, pagu anggaran Biro Hukum dan Organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2018 sebesar Rp10.451.383.000, dari alokasi anggaran. Dari total anggaran, terealisasikan sebesar Rp 9.282.388.022,00, 88,81%. Alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung Sasaran Kegiatan “Tersedianya Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum”.
8. Keberhasilan Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2018 adalah:
 - a. Penerbitan Per BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 - b. Penerbitan Per BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 - c. Kaji ulang bisnis proses Badan POM sesuai dengan OTK baru.
 - d. Nilai RB area penataan peraturan perundang-undangan meningkat dari tahun 2017 sebesar 2,71 menjadi 2,91 pada tahun 2018.
 - e. Nilai RB area penguatan organisasi meningkat dari tahun 2017 sebesar 4,01 menjadi 4,51 pada tahun 2018.

- f. Nilai RB area tata laksana meningkat dari 3,92 tahun 2017 menjadi 4,14 pada tahun 2018.
- 9. Biro Hukum dan Organisasi telah memiliki rencana tindakan korektif dan terobosan untuk dilaksanakan pada tahun 2018 dalam rangka memperbaiki kinerja unit organisasi. Beberapa tindakan korektif yang akan diambil antara lain: sistem aplikasi pemberian keterangan saksi/ahli (SIKOFI-OM), pengembangan aplikasi sistem pengendalian peraturan perundang-undangan.
- 10. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 ini menjelaskan mengenai rencana, target, pembiayaan, upaya, dan hasil pencapaian selama tahun anggaran 2018 yang telah dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi sebagai pertanggungjawaban atas kinerjanya kepada stake holder.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja 2018, perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya. Langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi, antara lain adalah:

1. Langkah dalam rangka mempertahankan capaian dengan melakukan kaji ulang dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap Sistem Manajemen Mutu (QMS) Biro Hukum dan Organisasi dengan berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan segala sumber daya yang tersedia melalui partisipasi seluruh personil yang terlibat untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Langkah dalam rangka meningkatkan capaian, perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian kinerja sasaran yang terdapat pada Perjanjian Kinerja, sehingga perlu dilakukan review terhadap indikator kinerja “Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi” dan penentuan dasar penetapan target didasarkan pada baseline dan pencapaian tahun 2018.
3. Langkah-langkah lain yang diperlukan revisi terhadap definisi operasional pada indikator “Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun” terhadap Keputusan yang disusun dengan hanya membatasi sampai dengan Keputusan Kepala BPOM yang bersifat kebijakan.
4. Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi tahun 2018 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada pimpinan organisasi dan *stakeholder* dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

Lampiran 1
Renstra Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
2015-2019 (OTK Lama)

RENCANA STRATEGIS BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Tahun 2015 - 2019									
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA						KEGIATAN
			2015	2016	2017	2018	2019	2019 ¹⁾	
1. Tersusunnya peraturan perundang-undangan yang efektif 2. Terwujudnya layanan bantuan hukum, komunikasi, informasi, dan edukasi yang efektif, efisien, dan akuntabel	Sasaran Strategis								
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat pengawasan obat dan makanan	Jumlah Peraturan Kepala BPOM yang diundangkan	20	20	20	20	20	100	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan efektivitas kerja sama	Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan	70 -	70 Cukup	75 Baik	80 Baik	85 Baik	85 Baik	
	Sasaran Kegiatan								
	Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan obat dan makanan	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun (dokumen)	150	160	170	180	190	850	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat
	Meningkatnya kualitas layanan komunikasi, informasi, dan edukasi obat dan makanan	Jumlah informasi obat dan makanan yang dipublikasikan (informasi)	91	95	122	103	107	518	
Jumlah layanan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti (layanan)		9000	9000	10000	11000	12000	51000		
Terselenggaranya layanan pertimbangan hukum, penyuluhan hukum, dan bantuan hukum	Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan (layanan)	150	200	200	160	165	875		

Lampiran 2
Revisi Renstra Biro Hukum dan Organisasi (OTK Baru)

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja	
		2018	2019
Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	2,85	3
	Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	4,15	4,30
	Nilai RB BPOM penataan tata laksana	4,00	4,30
Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	60	61
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di Biro Hukum dan Organisasi	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi	100	100
Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	100	100
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100	100
	Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100	100
Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi sesuai dengan road map RB BPOM 2015- 2019	Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi	78	81

Lampiran 3

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	TARGET			
				B3	B6	B9	B12
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah peraturan Kepala Badan POM yang diundangkan	25	8	15	20	25
		Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun	200	50	100	150	200
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan efektivitas kerjasama	Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan	Baik	-	-	-	Baik
		Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	80	-	-	-	80
		Jumlah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan	126	32	66	102	126
		Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen yang ditindaklanjuti	17.500	4.375	8.750	13.125	17.500
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan	250	80	150	200	250

Jakarta, Januari 2018
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Riati Anggriani, SH., MARS., M.Hum
NIP. 19610319 198603 2 001

Lampiran 4
Rencana Aksi Biro Hukum dan Organisasi OTK baru

Sasaran Strategis	Indikator	TARGET TAHUNAN	TARGET			
			B3	B6	B9	B12
Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	2,85	-	-	-	2,85
	Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	4,15	-	-	-	4,15
	Nilai RB BPOM penataan tata laksana	4,00	-	-	-	4,00
Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	60	-	-	-	60
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di Biro Hukum dan Organisasi	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi	100%	-	-	-	100%
Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	100%	-	-	-	100
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100%	20	40	60	100
	Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100%	20	40	60	100
Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi sesuai dengan road map RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi	78	-	-	-	78

Jakarta, Maret 2018
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Riati Anggriani,SH.,MARS.,M.Hum

Lampiran 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Januari – Februari (OTK LAMA)

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@indo.net.id, Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:



Nama : Riati Anggriani, SH, MARS, M.HUM.
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si.
Jabatan : Sekretaris Utama Badan POM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua, Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2018

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
 
Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si. Riati Anggriani, SH, MARS, M.HUM.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
UNIT KERJA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sasaran Program : Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat pengawasan obat dan makanan	Jumlah Peraturan Kepala BPOM yang diundangkan	25 Peraturan
	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan obat dan makanan	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun	200 Rancangan
2	Sasaran Program : Meningkatnya partisipasi masyarakat dan efektivitas kerjasama	Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap obat dan makanan	Baik
		Persentase Pengaduan Konsumen yang ditindaklanjuti	80 %
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas layanan komunikasi, informasi, dan edukasi obat dan makanan	Jumlah KIE obat dan pangan aman	126 KIE
		Jumlah layanan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	17.500 Layanan
3	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan	250 Layanan
	Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya layanan pertimbangan hukum, penyuluhan hukum, dan bantuan hukum		

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@indo.net.id, Website : www.pom.go.id

Kegiatan dan Anggaran :

No.	Sasaran Kegiatan	Anggaran
1.	Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan obat dan makanan	Rp 4.900.225.000,-
2.	Meningkatnya kualitas layanan komunikasi, informasi, dan edukasi obat dan makanan	Rp 14.918.700.000,-
3.	Terselenggaranya layanan pertimbangan hukum, penyuluhan hukum, dan bantuan hukum	Rp 5.499.375.000,-

Jakarta, 7 Januari 2018

Sekretaris Utama Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 
Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si. Riati Anggriani, SH, MARS, M.HUM.

Lampiran 6 Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Maret – Agustus (Output Baru Dipa Lama)

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax: 4245139
Email: halobpom@pom.go.id Website: www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riati Anggriani, SH., MARS., M.HUM.
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Elin Herlina, Apt., MP.
Jabatan : Sekretaris Utama Badan POM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua, Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Maret 2018

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Dra. Elin Herlina, Apt., MP. Riati Anggriani, SH., MARS., M.HUM.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax: 4245139
Email: halobpom@pom.go.id Website: www.pom.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
UNIT KERJA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sasaran Strategis : Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi Nilai RB BPOM penataan tata laksana	2,85 4,15 4,00
2	Sasaran Strategis : Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	60
3	Sasaran Strategis : Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di Biro Hukum dan Organisasi	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi	100 %
4	Sasaran Strategis : Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	100%
5	Sasaran Strategis : Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100% 100%
6	Sasaran Strategis : Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi sesuai dengan roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi	68

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax: 4245139
Email: halobpom@pom.go.id Website: www.pom.go.id

Kegiatan dan Anggaran :

No.	Sasaran Kegiatan	Anggaran
1.	Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan obat dan makanan	Rp 4.608.015.000,-
2.	Meningkatnya kualitas layanan komunikasi, informasi, dan edukasi obat dan makanan	Rp 12.356.946.000,-
3.	Terselenggaranya layanan pertimbangan hukum, penyuluhan hukum, dan bantuan hukum	Rp 3.602.939.000

Jakarta, 1 Maret 2018

Sekretaris Utama Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Dra. Elin Herlina, Apt., MP. Riati Anggriani, SH., MARS., M.HUM.

Lampiran 7 Perjanjian Kinerja Tahun 2018
September – Desember (Output Baru DIPA lama)

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Pahlawan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244491, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax: 4245139
Email: info@pom.go.id Website: www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riati Anggriani, SIL, MARS, M.HUM
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Elin Herlina, Apt., MP
Jabatan : Sekretaris Utama Badan POM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Juli 2018

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Dra. Elin Herlina, Apt., MP Riati Anggriani, SIL, MARS, M.HUM.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Pahlawan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244491, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax: 4245139
Email: info@pom.go.id Website: www.pom.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
UNIT KERJA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sasaran Strategis : Meningkatkan capaian RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	2,85 4,15
2	Sasaran Strategis : Meningkatkan kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	60
3	Sasaran Strategis : Terlaksananya rencana aksi RB BPOM di Biro Hukum dan Organisasi	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi	100%
4	Sasaran Strategis : Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	100%
5	Sasaran Strategis : Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100% 100%
6	Sasaran Strategis : Terwujudnya RB Biro Hukum dan Organisasi sesuai dengan road map RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi	68

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Pahlawan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244491, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax: 4245139
Email: info@pom.go.id Website: www.pom.go.id

Kegiatan dan Anggaran :

No.	Sasaran Kegiatan	Anggaran
1	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang diselesaikan	Rp 4.693.794.000,-
2	Layanan Advokasi Yang diberikan	Rp 997.161.000,-
3	Dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi program penataan dan penguatan organisasi serta program penguatan tata laksana	Rp 2.728.640.000,-
4	Layanan Internal	Rp 2.031.788.000,-

Jakarta, 20 Juli 2018

Sekretaris Utama Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Dra. Elin Herlina, Apt., MP Riati Anggriani, SIL, MARS, M.HUM.

Lampiran 8 Rencana Kerja Tahunan 2018 (OTK lama)

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
 Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.04.23.01.18.0034 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2018

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Memimbang : a. bahwa masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan untuk memonitor dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen sesuai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penetapan Rencana Kinerja Tahunan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Tahun 2018;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
 Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;

7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.11.10.10508 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2018.**

Pertama : Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Rencana Kinerja Tahunan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam dikum Peratama merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat serta menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat pada tahun 2018.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 2 Januari 2018
 Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Badan Pengawas Obat dan Makanan,

 Riah Kusarjanto SH, MARS, M.Hum
 NP. 19510319.198603.2.001


BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
 Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR HK.23.01.18.0034 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN BIRO HUKUM DAN
 HUBUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2018

RENCANA KINERJA TAHUNAN
BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
TAHUN 2018

Unit Organisasi Eselon II : Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Tahun Anggaran : 2018

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersusunnya rancangan Peraturan Perundang-undangan terkait pengawasan obat dan makanan	Jumlah rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang disusun	200 Rancangan
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	Jumlah KIE Obat dan Makanan Jumlah Layanan Pengaduan dan Informasi Konsumen yang ditindaklanjuti	126 KIE 17.500 Layanan
3	Terselenggaranya Layanan Pertimbangan/Opini Hukum, Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum	Jumlah Layanan Bantuan Hukum yang diberikan	250 Layanan

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Badan Pengawas Obat dan Makanan,

 Riah Kusarjanto SH, MARS, M.Hum
 NP. 19510319.198603.2.001

Lampiran 9 Rencana Kerja Tahunan 2018 (OTK Baru)

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
 Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR HK.04.23.01.18.0034 TAHUN 2018**

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
 BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2018

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan untuk memonitor dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen sesuai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penetapan Rencana Kinerja Tahunan Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2018;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;

6. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;

7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.11.10.10508 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI;

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
 Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2018-2019

Pertama : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2018-2019, yang selanjutnya disebut IKU Biro Hukum dan Organisasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : IKU Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Revisi Rencana Strategis Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2015-2019.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2018
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 Badan Pengawas Obat dan Makanan,
 Eliy Anggrini, SH, MARS, M.HUM
 NIP. 19610319 198604 2 001

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
 Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR 04.23.03.18.0809 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2018

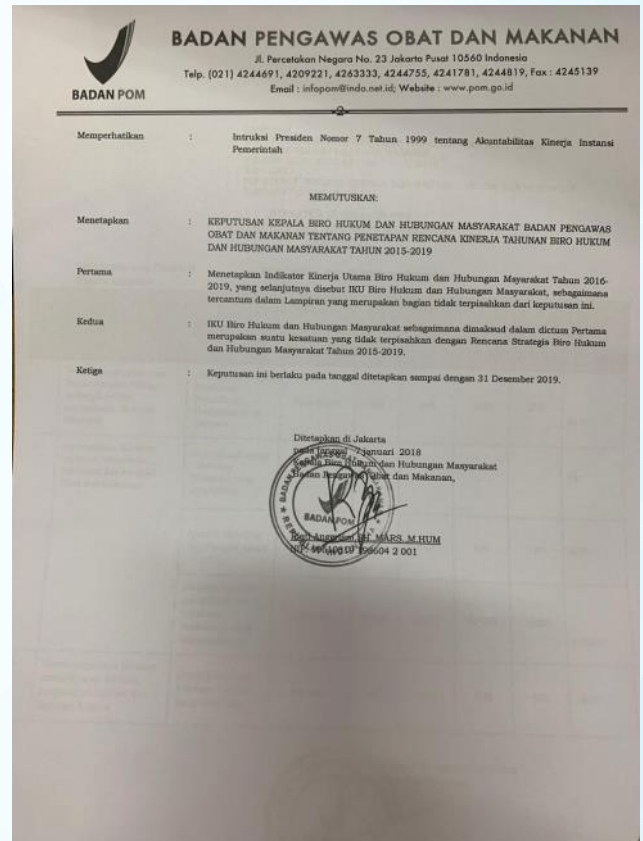
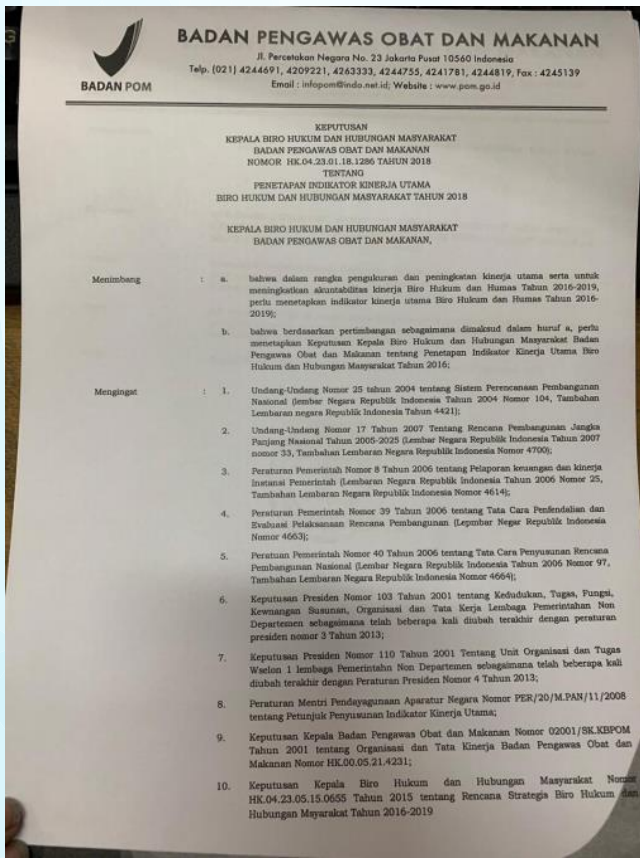
RENCANA KINERJA TAHUNAN
 BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
 TAHUN 2018

Unit Organisasi Eselon II : Biro Hukum dan Organisasi
 Tahun Anggaran : 2018

Basis, Strategi	Indikator	Target
		2018
Meningkatnya capaian RB EPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi sesuai roadmap RB EPOM 2015-2019	Nilai RB EPOM Penataan peraturan perundang-undangan	2,85
	Nilai RB EPOM Penataan dan pengisian organisasi	4,15
Meningkatnya kepatuhan internal EPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	Nilai RB EPOM penataan tata laksana	4,00
	Indeks kepuasan internal EPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Hukum dan Organisasi	60
Terlaksananya rencana aksi RB EPOM di Biro Hukum dan Organisasi	Persentase realisasi rencana aksi RB EPOM di lingkup Biro Hukum dan Organisasi	100
Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	100
	Perentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Perentase advokasi hukum yang dilaksanakan	100
	Nilai AKIP Biro Hukum dan Organisasi	78

Eliy Anggrini, SH, MARS, M.HUM
 NIP. 19610319 198604 2 001

Lampiran 10 Indikator Kinerja Utama 2018 (OTK Lama)



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
 Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR HK.04.23.01.18.1286 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN
 MASYARAKAT TAHUN 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
 TAHUN 2018

Unit Organisasi Eselon II : Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Tahun Anggaran : 2018

No.	Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target					
			Satu	2016	2017	2018	2019	2019*
1.	Tersusunnya rancangan Peraturan perundang-undangan terkait pengawasan obat dan makanan	Jumlah rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang disusun	Rancangan	200	200	200	210	810*
2	Meningkatkan Kualitas Layanan Pengaduan Informasi dan edukasi Obat dan Makanan	Jumlah informasi Obat dan Makanan yang dipublikasi	Informasi	95	-	-	-	95*
		Jumlah KIE Obat dan Pangan Aman	KIE	-	122	126	130	378*
		Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen yang ditindaklanjuti	Layanan	14000	16800	17500	18200	66500*
3	Terselenggaranya layanan pertimbangan hukum, penulisan hukum dan bantuan hukum	Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan	layanan	220	220	250	350	1040*

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Badan Pengawas Obat dan Makanan,
 Drs. Anggoro Satrio MARS, M.HUM
 NIP. 1961019-1-19603 2 001

Lampiran 11 Indikator Kinerja Utama 2018 (OTK baru)

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
 Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN
 KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR HK.04.23.03.18.0050 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2018

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang :

- belwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja utama serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Biro Hukum dan Humas Tahun 2018-2019, perlu menetapkan indikator kinerja utama Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2018-2019;
- belwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2018;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK.KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231;
- Keputusan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Nomor HK.04.23.05.15.0655 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Tahun 2016-2019

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
 Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2018-2019, yang selanjutnya disebut IKU Biro Hukum dan Organisasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** : IKU Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Revisi Rencana Strategis Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2015-2019.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 1 Maret 2018
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 Badan Pengawas Obat dan Makanan,
 Riati Anggrini, SH, MARS, M.HUM
 NIP. 196103101986042001

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
 Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR HK.04.23.01.18.0090 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
 TAHUN 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
 TAHUN 2018**

Unit Organisasi Eselon II : Biro Hukum dan Organisasi
 Tahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja	
		2018	2019
Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	100	100
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100	100
	Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100	100

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
 Badan Pengawas Obat dan Makanan,
 Riati Anggrini, SH, MARS, M.HUM
 NIP. 196103101986032001

LAMPIRAN 13
PENGUKURAN EFIISIENSI KEGIATAN
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
Tahun Anggaran 2018

SASARAN	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana						
	1 Penataan dan Penguatan Organisasi	88,44%	100,00%	1,13	1,00	Efisien	0,13
	2 Koordinasi BPOM di Kab/Kota	99,07%	100,00%	1,01	1,00	Efisien	0,01
	3 Fasilitasi RB BPOM	89,57%	100,00%	1,12	1,00	Efisien	0,12
	4 Penataan Tatalaksana	89,31%	100,00%	1,12	1,00	Efisien	0,12
	5 Resertifikasi QMS ISO 9001:2015 BPOM	99,82%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	6 Belanja Peralatan Modal dan Mesin	80,00%	80,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	7 Koordinasi Internal dan Eksternal Bidang Hukum, PP, dan Organisasi serta Tatalaksana	91,29%	95,00%	1,04	1,00	Efisien	0,04
	8 Pembahasan dan Penyusunan Kegiatan Biro hukum dan Organisasi	94,97%	100,00%	1,05	1,00	Efisien	0,05
	9 Monitoring dan Evaluasi Biro Hukum dan Organisasi	99,23%	100,00%	1,01	1,00	Efisien	0,01
10 Operasional Biro Hukum dan Organisasi	88,27%	90,00%	1,02	1,00	Efisien	0,02	
	11 Pertimbangan Hukum terkait Permasalahan di Bidang Obat dan Makanan	94,82%	103,00%	1,09	1,00	Tidak Efisien	0,09
	12 Penanganan Perkara/ Biaya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Badan POM	95,24%	101,00%	1,06	1,00	Tidak Efisien	0,06
	13 Pemberian Advokasi (Advokat)Hukum kepada Pegawai Di Lingkungan BPOM	99,80%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	14 Penyuluhan Hukum /Sosialisasi Peraturan Perundang-Undnganke Unit Pelaksana Teknis Pusat dan BBPOM	94,07%	105,00%	1,12	1,00	Tidak Efisien	0,12
	15 Koordinasi Pelaksanaan Penanganan Perkara/Gugatan Hukum BPOM	83,23%	100,00%	1,20	1,00	Efisien	0,20
	16 Penyelarasan dan Pengawasan Penyusunan NSPK/Peraturan Perundang-undangan terkait Obat dan Makanan	83,30%	150,00%	1,80	1,00	Tidak Efisien	0,80
	17 Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah	71,00%	83,00%	1,17	1,00	Tidak Efisien	0,17
	18 Pembahasan Peraturan Perundang-undangan	92,38%	100,00%	1,08	1,00	Efisien	0,08
	19 Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	52,31%	70,00%	1,34	1,00	Tidak Efisien	0,34
	20 Pembahasan Masukan terhadap Draft RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	93,72%	87,00%	0,93	1,00	Tidak Efisien	-0,07
	21 Koordinasi Lintas Sektor	68,48%	72,00%	1,05	1,00	Efisien	0,05
	22 Kajian Simplifikasi Peraturan Perundang-undangan	9,26%	40,00%	4,32	1,00	Tidak Efisien	3,32
	23 Finalisasi Draft Peraturan Perundang-undangan di Bidang Obat dan Makanan	83,53%	80,00%	0,96	1,00	Tidak Efisien	-0,04
	24 Pelaksanaan Operasional Peraturan Perundang-undangan	86,86%	83,00%	0,96	1,00	Tidak Efisien	-0,04
	25 Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan	65,64%	44,00%	0,67	1,00	Tidak Efisien	-0,33
	26 Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Obat dan Makanan	100,00%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	27 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	63,82%	80,00%	1,25	1,00	Efisien	0,25
	28 Pengembangan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Peraturan	60,10%	63,10%	1,05	1,00	Efisien	0,05

**Lampiran 14
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI**

**Unit Organisasi Eselon II : Biro Hukum dan Organisasi
Tahun Anggaran : 2018**

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM				
	Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana Sub Kegiatan:				
		Rasio tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi organisasi dan tata laksana terhadap total rekomendasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
1	Penataan dan Penguatan Organisasi	Input: Dana Output: Jumlah Kajian	521.059.000 1	460.605.108 1	88,40% 100,00%
2	Koordinasi BPOM di Kab/Kota	Input: Dana Output: Laporan	441.625.000 1	437.449.500 1	99,05% 100,00%
3	Fasilitasi RB BPOM	Input: Dana Output: Laporan	346.850.000 1	310.661.405 2	89,57% 200,00%
4	Penataan Tatalaksana	Input: Dana Output: Laporan	472.685.000 2	422.145.050 2	89,31% 100,00%
5	Resertifikasi QMS ISO 9001:2015 BPOM	Input: Dana Output: Laporan	7.713.000.000 1	0 1	0,00% 100,00%
		Jumlah peraturan perundang-undangan yang disusun	220	464	210,91%
1	Penyelarasan dan Pengawasan Penyusunan NSPK/Peraturan Perundang-undangan terkait Obat dan Makanan	Input: Dana Output: Jumlah Balai Besar/Balai POM yang dilakukan Penyelarasan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Obat dan Makanan	117.160.000 4	97.591.699 6	83,30% 150,00%
2	Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah	Input: Dana Output: Jumlah pembahasan rancangan peraturan pemerintah	575.233.000 12	409.245.000 10	71,14% 83,33%
3	Pembahasan Peraturan Perundang-undangan	Input: Dana Output: Jumlah pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan	378.710.000 22	349.859.592 18	92,38% 81,82%
4	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	Input: Dana Output: Jumlah pembahasan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi penyusunan peraturan perundang-undangan	91.175.000 10	47.696.593 7	52,31% 70,00%
5	Pembahasan Masukan terhadap Draft RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	Input: Dana Output: Jumlah pembahasan masukan terhadap draft RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	2.117.646.000 15	1.984.582.600 13	93,72% 86,67%
6	Koordinasi Lintas Sektor	Input: Dana Output: Jumlah koordinasi lintas sektor yang dilaksanakan	209.500.000 193	143.472.601 138	68,48% 71,50%
7	Kajian Simplifikasi Peraturan Perundang-undangan	Input: Dana Output: Jumlah pembahasan Kajian Simplifikasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Obat dan Makanan	81.180.000 5	7.520.000 2	9,26% 40,00%
8	Finalisasi Draft Peraturan Perundang-undangan di Bidang Obat dan Makanan	Input: Dana Output: Jumlah Pembahasan Finalisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Obat dan Makanan	404.600.000 20	337.497.696 16	83,42% 80,00%
9	Pelaksanaan Operasional Peraturan Perundang-undangan	Input: Dana Output: Jumlah paket pengadaan operasional bagian Peraturan Perundang-undangan	48.000.000 6	41.694.000 5	86,86% 83,33%
10	Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan	Input: Dana Output: Jumlah dokumentasi peraturan perundang-undangan berupa: Paket Buku Paket DVD	235.345.000 9 1 1	154.475.203 4 1 1	65,64% 44,44% 100,00% 100,00%
11	Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Obat dan Makanan	Input: Dana Output: Jumlah dokumen terjemahan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris	120.000.000 1	120.000.000 1	100,00% 100,00%
12	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Input: Dana Output: Jumlah BB/BPOM yang disosialisasikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan (Penyebarluasan dalam Rangka Sosialisasi)	120.200.000 5	81.821.902 4	68,02% 80,00%
13	Pengembangan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Peraturan	Input: Dana Output: Jumlah paket aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dikembangkan	75.000.000 1	75.000.000 1	100,00% 100,00%
		Persentase Advokasi Hukum yang diselesaikan	100%	103%	103,00%
1	Pertimbangan Hukum terkait Permasalahan Pengawasan di Bidang Obat dan Makanan yang terjadi di Lingkungan BPOM	Input: Dana Output: Laporan	194.010.000 100	183.961.300 103	94,82% 103,00%
2	Penanganan Perkara/ Biaya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Badan POM	Input: Dana Output: Layanan	307.385.000 100	292.755.900 101	95,24% 101,00%
3	Pemberian Advokasi Hukum kepada Pegawai di lingkungan BPOM	Input: Dana Output: Dokumen	100.000.000 2	99.800.000 2	99,80% 100,00%
4	Penyuluhan Hukum Berkaitan dengan Upaya Penegakan Hukum di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan ke UPT BPOM	Input: Dana Output: Laporan	98.905.000 100	93.036.400 105	94,07% 105,00%



BADAN POM